



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ACHMAD FAUZI BIN MOH HASAN, NIK. 3508161206030003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT025, RW004, Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, Orangtua/ Wali Calon Suami Adik Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : Warda Fiknina Binti Moh Hasan

Nik : 3508165710060001

Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 17 Oktober 2006

Hal. 1 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun, 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Kerja
Tempat kediaman di : Dusun Darungan RT.25 RW. 04 Desa Umbul
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Ahmad Khosim Bin Moh Toriman
Nik : 3508161901020002
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 19 Januari 2002
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Curah Lengkong RT.28 RW. 10 Desa
Curahpetung Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten
Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara Adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Adik Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal. 2 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Adik Pemohon bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan dengan calon suaminya bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Adiknya, calon suami Adik Pemohon beserta orangtuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Anaknya, Calon Suami Adik Pemohon beserta orangtuanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko dan dampak negatif dari pernikahan anak yang masih dibawah umur, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena anak masih dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, dengan maksud agar

Hal. 3 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan Adiknya tersebut hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Pemohon khawatir dengan hubungan Adik Pemohon dengan calonnya yang sudah demikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan selama 1 tahun, sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia baru berumur 17 tahun, 7 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman;
- Bahwa ia sudah mengenal calon suaminya tersebut lebih dari 1 tahun lalu, mereka saling mencintai dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, kemana-mana selalu pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan 1 tahun lamanya sehingga ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan murni atas keinginannya sendiri karena ia dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai satu sama lain
- Bahwa ia sudah berfikir secara matang dan telah siap lahir bathin untuk menikah dan menjadi Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta siap dengan segala resikonya;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan mereka sama-sama beragama Islam dan pernikahannya hanya terbentur kurangnya usia menikah menurut undang-undang yang berlaku;

Hal. 4 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus perawan sementara calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Adik Pemohon bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami Adik Pemohon;
- Bahwa ia telah mengenal Adik Pemohon yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan lebih dari 1 tahun yang lalu, dan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan telah bertunangan selama 1 tahun sehingga ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena ia dengan calonnya sudah sangat saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa ia sudah memikirkan masak-masak tentang keinginannya untuk menikah dan sudah siap secara fisik, mental, ekonomi dan kesehatan untuk menikah walaupun calon istrinya masih kurang umurnya serta akan berusaha membina rumah tangganya dengan baik agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik, namun pernikahan belum bisa dilaksanakan karena calonnya masih kurang umurnya;
- Bahwa ia dengan Adik Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orangtua/ Wali Calon Suami Adik Pemohon yang bernama: Moh. Toriman Bin Samari, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Curah Lengkong RT.28 RW. 10 Desa Curahpetung Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon serta sanggup

Hal. 5 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik rumah tangga Adiknya kelak serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Adiknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3508161206030003, tanggal 29-12-2020, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli surat keterangan, Nomor: 470/113/427.96.05/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Asli surat keterangan, Nomor: 470/106/427.919.05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3508160305180001, tanggal 03-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3508165710060001, tanggal 05-12-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir, Nomor: DN-05/D-SD/06/0048271, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3508161901020002, tanggal 17-03-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah Nomor B-68/Kua.13.05.18/PW.01/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (Bukti P.8);
9. Asli Surat keterangan Nomor: 893.3/460/427.52.25/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari dokter UPT puskesmas Kedungjajang, telah bermeterai cukup (bukti.9)

B. Saksi-saksi

Hal. 6 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamal Bin Saden Sukar, tempat tanggal lahir, Lumajang, 10 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT25, RW04 Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan Adiknya yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan dengan calonnya yang bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman karena masih kurang umurnya untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa Adik Pemohon masih berumur 17 tahun, 7 bulan;
 - Bahwa Adik Pemohon berstatus perawan dan calonnya jejaka;
 - Bahwa antara Adik Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan Adiknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Adik Pemohon dengan calonnya sudah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan sejak 1 tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya kesana-kemari selalu berdua;
 - Bahwa Adik Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;

Hal. 7 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon Tidak Kerja sementara calonnya telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calonnya;
2. Masfud Bin Raji, tempat tanggal lahir, Lumajang, 09 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT25, RW04 Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Adiknya yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Adik Pemohon umurnya masih 17 tahun, 7 bulan;
 - Bahwa Adik Pemohon berstatus perawan dan calonnya jejaka;
 - Bahwa antara Adik Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan Adiknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan Adiknya dengan calonnya karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir menimbulkan mudharat jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon dengan calonnya sudah bertunangan 1 tahun lamanya, dan saksi sering melihat kemana-mana mereka selalu bersama;
- Bahwa Adik Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;
- Bahwa Adik Pemohon Tidak Kerja sementara calonnya telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calonnya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin bagi Adiknya yang beragama Islam yang belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi apabila pernikahan tetap dipaksakan bagi anak, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak sehingga sebaiknya menunggu usia Adik Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 berupa Asli surat keterangan, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Fotokopi Ijazah anak, telah bermaterai cukup dan yang berupa fotokopi telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan, sedangkan kedua orangtua dari anak tersebut berhalangan karena bekerja di Malaysia, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk Adik Pemohon yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman, karena rencana pernikahan tersebut ditolak

Hal. 10 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan alasan umur calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan Adik Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami Adik Pemohon, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan dari siapapun dan baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita telah siap secara psikologis, kesehatan dan ekonominya untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta orangtua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka menurut penilaian Majelis alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah

Hal. 12 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Adik Pemohon dan calon suami Adik Pemohon serta Orangtua Calon Suami Adik Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa Adik Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, 7 bulan dan telah lulus pendidikan SMP;
- Bahwa Adik Pemohon dengan calonnya telah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 1 tahun terakhir, mereka sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan lagi dan mereka telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatannya untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa pernikahan Adik Pemohon dengan calonnya mendesak untuk segera dilakukan dengan maksud menghindarkan Adik Pemohon dengan calonnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain dari perbuatan zina serta menjaga nama baik dan menjaga kehormatan di lingkungan setempat;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan Adik Pemohon dengan calonnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang namun ditolak dengan alasan umur Adik Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Adik Pemohon berstatus perawan dan calonnya berstatus jejaka, serta tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa Calon Suami Adik Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga Calon Suami Adik Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;

Hal. 13 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Orangtua Calon Suami Adik Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka jika sudah menikah nantinya;
- Bahwa Adik Pemohon telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, antara Adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin harus mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental untuk seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Adik Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya dan bersedia menikah dengan calonnya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera diikat dalam perkawinan yang sah atau jika Adik Pemohon harus menunggu umur 19 tahun;

Hal. 14 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudharat) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain, membawa dampak negatif yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan sementara orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif, sehingga menikahkan anak yang sudah dipandang telah siap secara fisik, mental dan finansialnya untuk menikah, walaupun usianya belum 19 tahun adalah upaya untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianya lagi Maha Mengetahui “;*

2. Kaidah Fiqihyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Adiknya bernama Warda Fiknina Binti Moh Hasan dengan calon suaminya bernama Ahmad Khosim Bin Moh Toriman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Masykur Rosih
Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal., Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)